

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN YANG
TIDAK DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Oleh

Putu Bhaskara Perwira Negara, NIM 1714101074

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana keabsahan perkawinan jika suatu perkawinan tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. (2) Bagaimana kerugian yang ditimbulkan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil adalah lembaga yang memiliki kewenangan dan bertugas untuk memberikan kepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perkawinan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, “sahnya suatu perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan mau dicatatkan ataupun tidak dicatatkan akan tetap dipandang sah tetapi hal tersebut dapat memicu dampak hukum karena perkawinan tersebut tidak tercatat. Perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil tidak hanya berdampak hukum pada suami-istri saja, tetapi juga akan berdampak pada anak.

Kata kunci: Keabsahan, Perkawinan, Catatan Sipil.

**A JURIDICAL REVIEW OF THE LEGALITY OF MARRIAGE THAT WERE
NOT REGISTERED IN THE CIVIL REGISTRATION OFFICE WAS
REVIEWED FROM STATUTE NUMBER 16 OF 2019 ON THE NUMBER 1
AMENDMENT TO 2019 ON MARRIAGE**

By

Putu Bhaskara Perwira Negara, NIM 1714101074

Majoring In Law And Citizenship

The Study Of Law

ABSTRACT

The research is aimed at: (1) To find out what the legitimacy of marriage would be if the marriage was not registered in the registry office. (2) What harm is done to children born of marriages that are not registered in the registry office. The registry office is an institution that has the authority and duty to provide legal certainty. The type of study in this study is a normative legal study that focuses on the norms of positive laws that govern the issues to be discussed. In normative legal research data collection is done with literature studies. The data analysis used in normative law research is qualitative analysis. Research shows that marriages in Indonesia are traditionally underpaid by the 16th-century 2019 act on marriage. According to the law of marriage, “the legality of marriage is to be performed according to the laws of their own religion and beliefs” as defined in chapter 2 of verse (1) act no. 16 of 2019. Whether a marriage is signed in or not is viewed as valid, it can trigger the legal effects of an unregistered marriage. Failed marriages in the registry office have not only a legal effect on couples but also a child.

Key words: Validity, Marriage, Civil Registration.